

**ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA PEGADAIAN  
SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU  
DARI *SHARIAH COMPLIANCE*  
(Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada  
Bank Syariah Mandiri Kota Metro)**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E)**

**Oleh**

**NOVA PURNAMA SARI**

**NPM :1760102011**

**Program Studi Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**



**PASCA SARJANA EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA PEGADAIAN  
SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU  
DARI *SHARIAH COMPLIANCE*  
(Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada  
Bank Syariah Mandiri Kota Metro)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Oleh  
**NOVA PURNAMA SARI**  
**NPM : 1760102011**

**Program Studi Ekonomi Syariah**  
**Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si**  
**Pembimbing II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1443 H / 2021 M**

## PERNYATAAN ORISINIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Purnama Sari

NPM : 1760102011

Judul Tesis : **Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari *Shariah Compliance* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Januari 2021



ng membuat pernyataan,

Nova Purnama Sari

1760102011

## ABSTRAK

*Shariah compliance* secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan *Shariah compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat harus memiliki Fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingganya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah berinovasi mengeluarkan produk, salah satunya ialah produk gadai emas syariah. Data menunjukkan terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap gadai emas dari tahun 2015 s/d 2019 di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *file research* dengan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro. Wawancara dilakukan terhadap fungsionaris Pegadaian Syariah Cabang Metro, fungsionaris Bank Syariah Mandiri KC Metro, nasabah gadai emas dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari sumber data tertulis yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator yang digunakan dalam meninjau *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro, terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan *shariah compliance*, yakni indikator pertama yang berbunyi: "*akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.*" Pada praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dengan menggunakan rumus perhitungan yang persentasenya masih bergantung pada jumlah pinjaman dan itu bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN/III/2002 tentang *rahn* butir ke 4. Serta penetapan biaya administrasi di Pegadaian Syariah Cabang Metro belum didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas butir ke3.

**KataKunci:** *Rahn* Emas, *Shariah Compliance*, Dewan Pengawas Syariah

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan  
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya  
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu  
QS. An-Nisa:29*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah. Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya yang telah melancarkan saya dalam menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Husen dan Sarifah Ramdani. Tesis ini ananda persembahkan sebagai tanda bakti, rasa hormat serta rasa terima kasih.
2. Keluarga dan sahabat tersayang yang telah memberikan semangat serta mendukung dalam segala hal positif.
3. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik serta mampu berfikir untuk lebih maju.
4. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Nova Purnama Sari dilahirkan di Yukum Jaya, pada tanggal 23 November 1993, putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan Husen dan Sarivah Ramdani.

1. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 2 Bandar Jaya pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2005
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2008.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
4. Pendidikan Strata 1 di STAIN Jurai Siwo Metro jurusan Ekonomi Syariah, selesai pada tahun 2016.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi pada Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juni 2021

Nova Purnama Sari

NPM: 1760102011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: Analisis Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari *Shariah Compliance* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro).

Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Magister Ekonomi (M.E). Dalam menulis tesis ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang membantu penulis dan memberikan motivasi untuk itu mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar kegiatan perkuliahan.
3. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan



waktu dalam membimbing dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.

4. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama sahabat-sahabat seperjuangan tahun angkatan 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 25 Juni 2021

**Nova Purnama Sari**

**NPM: 1760102011**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINIL.....	iii
ABSTRAK .....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kerangka Berfikir.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ).....	17
B. <i>Shariah Compliance</i> .....	28
C. Lembaga Keuangan Syariah .....	40
D. Pendekatan <i>Mashlahah</i> dan <i>Maqasid</i> Syariah .....	45
E. Hasil Penelitian yang Relevan.....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
C. Data dan Sumber Data.....	50
D. Populasi dan Sampel .....	51
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	56
F. Prosedur Analisis Data .....	58
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	62
B. Temuan Penelitian.....	64
1. Implementasi Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Metro Ditinjau Dari <i>Shariah Compliance</i> .....	64
2. Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KC Metro Ditinjau Dari <i>Shariah Compliance</i> .....	71

C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan .....	115
B. Rekomendasi .....	116
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data perkembangan OSL dan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Metro.....	7
1.2 Data perkembangan jumlah gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro.....	7
3.1 Golongan Jaminan di Pegadaian Syariah .....	54
3.2 Golongan Jaminan di Bank Syariah Mandiri .....	54
3.3 Sampel Penelitian.....	54
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	55
4.1 Penerapan Indikator <i>Shariah Compliance</i> di Pegadaian Syariah Cabang Metro.....	64
4.2 Penerapan Indikator <i>Shariah Compliance</i> di Pegadaian Syariah Cabang Metro.....	73
4.3 Penerapan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Metro.....	83
4.4 Penerapan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro.....	90
4.5 Penerapan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> di Bank Syariah Mandiri KC Metro .....	92
4.6 Penerapan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> di Bank Syariah Mandiri KC Metro .....	96
4.7 Analisis Komparasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro. ....	99
4.8 Biaya Pemeliharaan ( <i>Equivalent Rate</i> ) Bank Syariah Mandiri KC Metro.....	108
4.9 Biaya Pemeliharaan ( <i>Equivalent Rate</i> ) Pegadaian Syariah Cabang Metro.....	108

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Berfikir .....	14
2.1 Kerangka Teori .....	15
2.1 Skema Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad <i>Ijarah</i> Gadai Syariah Pegadaian Syariah Metro .....	27
4.1 Bagan Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas.....	104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan industri syariah di Indonesia tidak terlepas dari berita negatif yang beredar di masyarakat. Hadir pemikiran yang mempertanyakan kesyariahan dari lembaga keuangan Islam. Karenanya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk meyakinkan masyarakat atas keraguan mereka terhadap lembaga Islam.<sup>1</sup> Sebagai upaya pengawasan operasional Lembaga Keuangan Syariah maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah.

*Shariah compliance* secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>2</sup> Bidang yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap *Shariah compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

*Shariah compliance* merupakan salah satu pilar dalam pengembangan Bank Syariah. PBI No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank umum berdasarkan prinsip syariah menyatakan bahwa Bank

---

<sup>1</sup>Eng Saiful Anwar, Muhammad Luthfi, Ismail A. Said, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada),h.82

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019).h.14

wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan Bank.

Alat ukur kualitatif *shariah compliance* di dalam Lembaga Keuangan Syariah ialah (1) Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku, (2) Dana zakat dibayar dan dihitung dikelola dengan aturan prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku, (4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, (5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah, (7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.<sup>3</sup>

Pelanggaran terhadap *Shariah compliance* berdampak pada resiko reputasi, citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah di mata masyarakat menjadi negatif sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia yang fungsinya dijalankan oleh bidang khususnya yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengeluarkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk Bank. Selanjutnya peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah Bank mendapat fatwa DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 146

semua Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah, dan kedua fungsi advisor (penasehat) ketika Bank dihadapkan kepada pertanyaan apakah aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.<sup>4</sup>

Implementasi *Shariah compliance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>5</sup>

Berbicara tentang inovasi produk, saat ini perbankan syariah telah mengembangkan jangkauan bisnisnya ke ranah gadai. Produk yang diluncurkan adalah gadai emas syariah (*rahn* emas). Salah satu perbankan yang memiliki produk gadai emas syariah tersebut ialah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah pelopor pertama produk gadai emas syariah di Indonesia pada 1 November 2001. Disusul oleh PERUM Pegadaian yang memang pada operasional usahanya ialah di bidang gadai, lalu kemudian mengembangkan usaha bisnisnya dengan membuka Unit Layanan Gadai

---

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan, 'Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya', [Http://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/BPS-Dan-Kelembagaan.aspx](http://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/BPS-Dan-Kelembagaan.aspx), 13 June 2019.

<sup>5</sup>Mervyn K Lewis and Lativa M, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik Dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007).h.23



Syariah (ULGS) yang selanjutnya meluncurkan produk gadai emas syariah (*rahn* emas) pada tahun 2003.

Gadai (*Rahn*) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya. Contoh, A meminta pinjaman uang kepada B, kemudian B meminta A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lain sebagainya sebagai jaminan hutangnya. Jika hutang telah jatuh tempo dari A tidak bisa membayar hutangnya, maka hutangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. A yang menjamin uang dinamakan *rahin* (penggadai), B yang meminjamkan uang dinamakan *murtahin* (penerima gadaian), dan barang yang digadaikan dinamakan *marhun*.<sup>6</sup>

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep *muamalah* yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan. Sebagaimana halnya instansi yang berlabel Islam, maka landasan konsep Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki dasar hukum KUHPdata pasal 1159 dan gadai dalam hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN N0. 25/DSN-MUI/III/2002 yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun dalil yang menjadi alasan hukum pelaksanaan diperbolehkannya *ar-rahn* yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 128

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>7</sup>

Ayat di atas memberikan gambaran yang umum, ketika tidak ada penulis dan saksi di tengah perjalanan bisa menggunakan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan. Hadis berikut ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW pernah melakukan praktek gadai yaitu:<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dan Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radiallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.”* H.R Bukhori

Hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara muslim dan non muslim dalam bidang *muamalah*, maka

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Robbani* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 283

<sup>8</sup>Bukhory, *Shahih Bukhory*, Terj: Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhory*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), Juz: 3, h. 538

seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim.<sup>9</sup> *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela dan tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal, hal inilah yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena termasuk ke dalam *riba*. Pada hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta baik bergerak ataupun tidak bergerak.

Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri menggunakan hak gadai pada benda bergerak sesuai dengan gadai pada hukum perdata dan menghapuskan menarik keuntungan dengan bunga atau sewa modal (*riba*) kemudian menggantinya dengan jasa penitipan barang (*ijarah*) yang sesuai dengan syariah.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, dasar pedoman yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal produk gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*.

Jika dilihat pada tabel di bawah ini adalah gambaran perkembangan usaha gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro periode 2015 s/d 2019.

---

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002).h.107

**Tabel 1.1**  
**Data perkembangan OSL dan Rahn Pegadaian Syariah Metro**

<b>Tanggal</b>	<b>Produk</b>	<b>OSL</b>	<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Rahin Aktif</b>
31/12/2015	<i>Rahn</i>	3.354.590.000	893	617
31/12/2016	<i>Rahn</i>	4.562.750.000	923	633
31/12/2017	<i>Rahn</i>	5.183.146.418	1.024	973
31/12/2018	<i>Rahn</i>	5.340.285.305	1.206	1.033
31/08/2019	<i>Rahn</i>	5.507.887.735	1.901	1.633

*Sumber : Pegadaian Syariah Metro tahun 2019*

**Tabel 1.2**  
**Data Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas**  
**Bank Syariah Mandiri KC Metro**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
1	2015	101
2	2016	151
3	2017	144
4	2018	145
5	2019	162

*Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Metro tahun 2019*

Pada tabel di atas terlihat bahwa perkembangan industri gadai syariah mengalami peningkatan tiap tahunnya, tak jauh berbeda dengan Bank Syariah Mandiri KC Metro mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara terus menerus.

Produk gadai emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ialah untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan baik itu kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Gadai emas yang kemudian pinjamannya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, kebutuhan harian, pembelian

barang dan lain sebagainya. Gadai emas untuk kebutuhan produktif ialah seperti untuk menambah modal usaha.

Data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah menyatakan bahwa peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2015-2019, sudah termasuk di dalamnya 30% nasabah gadai emas untuk kebutuhan produktif. Terjadi penambahan jumlah nasabah gadai emas sekitar 10% pada tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya produk gadai emas syariah diminati masyarakat dan tak terlepas memberikan kemanfaatan kepada masyarakat selain untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumtif, juga membantu pemenuhan kebutuhan produktif. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan apakah peningkatan jumlah nasabah gadai emas yang dialami Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015-2019 juga diikuti dengan penerapan *shariah compliance* yang berlaku. *Shariah compliance* (Kepatuhan syariah) secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan Bank Syariah tidak hanya dalam produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem dan identitas perusahaan.

Lebih lanjut peraturan Bank Indonesia Bab V Pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah, dijelaskan bahwa setiap Bank Syariah Wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, dimana tugas Dewan Pengawas Syariah ialah sebagai penasehat sekaligus pengawas dari keberlangsungan operasional Bank Syariah agar sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah. Namun, yang menjadi permasalahan disini ialah Dewan Pengawas Syariah hanya melakukan pengawasan melalui kantor pusat saja, sedangkan untuk dikantor cabang

pengawasan hanya dipantau secara garis besar saja melalui *reviewers* yang merupakan karyawan independen disuatu cabang Bank Syariah yang kemudian memberikan laporan kepada Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang dituangkan dalam sebuah judul analisis implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah Compliance* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro).

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Penelitian ini membatasi pembahasan pada implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance*. Berdasarkan pemaparan di atas maka subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berbeda basis tapi pada praktiknya memiliki produk yang sama yakni gadai emas syariah.
2. Kepatuhan Syariah merupakan salah satu tonggak dalam operasional Bank Syariah. PBI No.9/1/PBI/2007 tentang kerangka penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berlandaskan standar syariah menyebutkan bahwa Bank wajib melakukan operasional berdasarkan standar kehati-hatian dan standar syariah dalam rangka menjaga atau memajukan tingkat kesehatan Bank. Sehingga peneliti ingin meninjau kembali implementasi *Shariah*

*compliance* pada produk gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance* ?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan utama dari penelitian ini adalah: Untuk menemukan dan *me-review* bagaimana implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi syariah mengenai implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance*.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan (perusahaan, pemerintah, dan masyarakat) berkaitan dengan

implementasi gadai emas syariah di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance*.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan ekonomi yang baik menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Uang selalu dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, diperlukan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan, yang kemudian menjadi masalah ketika keinginan tidak dapat dipenuhi dengan uang yang dimiliki. Jika sudah demikian, maka yang perlu dilakukan ialah memilih kebutuhan yang dianggap paling pokok, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti menjual barang-barang berharga yang dimiliki atau meminjam dari sumber dana yang ada. Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat diatasi tanpa harus kehilangan barang berharga yaitu dengan menjaminkan barang tertentu. Barang yang dijaminkan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu tertentu setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu dan dapat diperoleh kembali setelah jangka waktu tertentu disebut gadai.<sup>10</sup>

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat diatasi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, dengan cara menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu

---

<sup>10</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 262



tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.<sup>11</sup>

Aplikasi gadai tidak asing lagi terdengar dalam kegiatan ekonomi. Gadai sebagai suatu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama ketika individu tersebut dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Kegiatan gadai yang sudah ada dimasyarakat pun berbeda-beda, mulai dari yang tradisional sampai pada modern yaitu melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari Bank dan non Bank, pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada produk gadai emas yang diluncurkan oleh Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki produk gadai emas syariah (*rahn*). Pada informasi lapangan yang diperoleh minat masyarakat terhadap gadai emas syariah terus meningkat tiap tahunnya, hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas syariah.

*Shariah compliance* secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>12</sup> Ada 5 indikator *shariah compliance* yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan, lingkungan

---

<sup>11</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 262

<sup>12</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h.14

kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah dan sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.<sup>13</sup> Elemen yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap *shariah compliance* di Lembaga Keuangan Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelanggaran *shariah compliance* yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah akan berdampak pada merusak citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat.

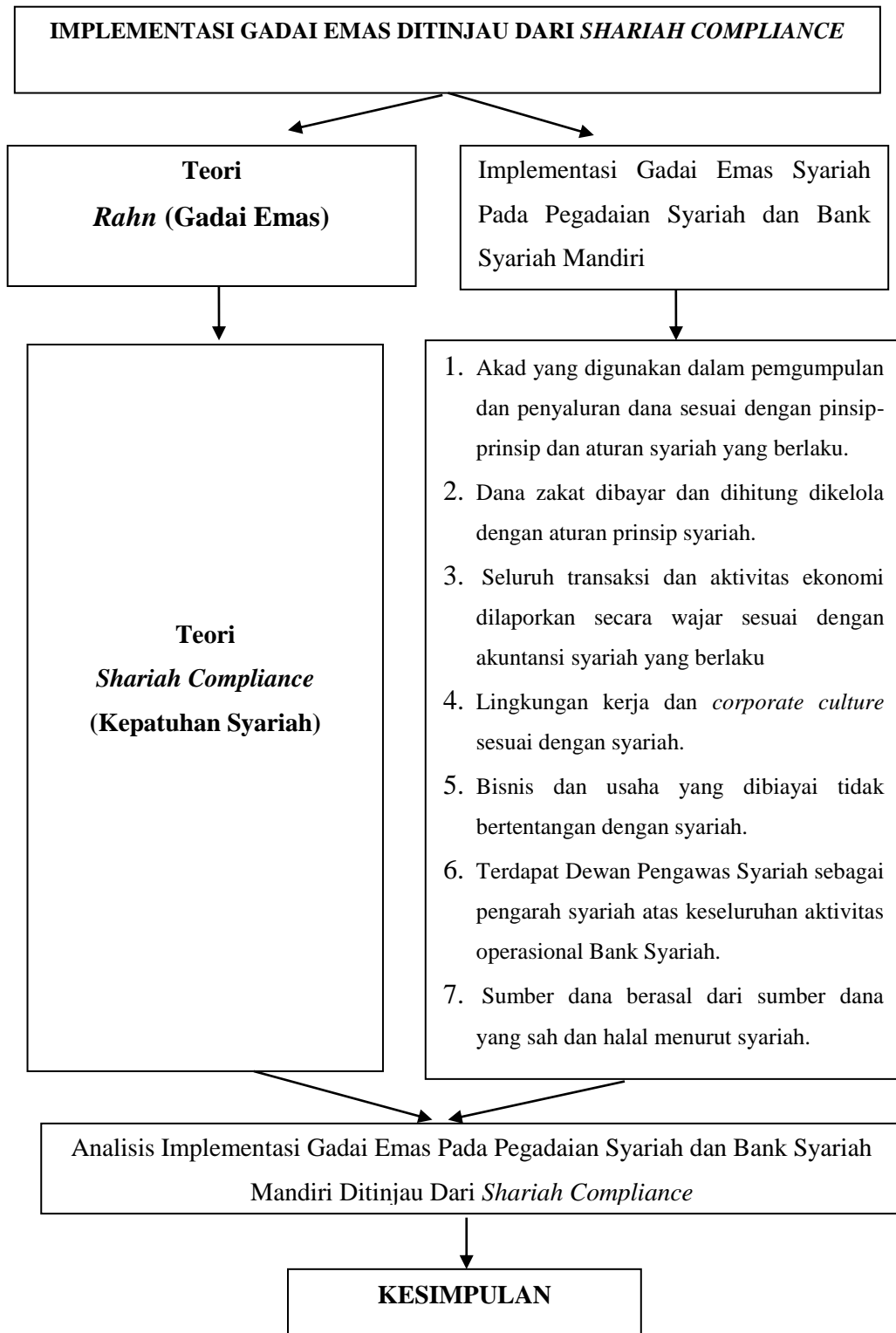
Berdasarkan pada penjabaran diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran yang telah peneliti rancang untuk penelitian ini.

---

<sup>13</sup>*Op.Cit*, h. 146

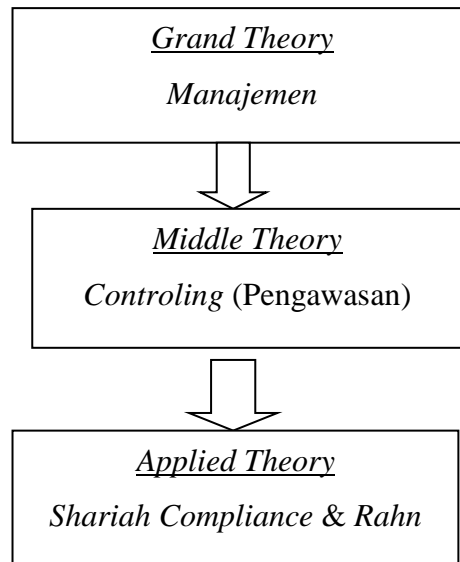
Gambar 1.1

## KERANGKA BERFIKIR



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA



*Grand Theory* atau biasa disebut dengan teori dasar, teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen. Manajemen didefinisikan sebagai proses yang khas dan terdiri atas tindakan-tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk melakukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>1</sup> Perusahaan tentunya membutuhkan pengetahuan terkait manajemen. Urgensi pengukuran manajemen dapat dijelaskan oleh dua teori di bawah ini:

*Agency Theory* atau teori keagenan, pada perusahaan terdapat dua pihak (perusahaan dan nasabah) yang saling berhubungan. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Agar tercapainya tujuan perusahaan dan

---

<sup>1</sup>George R Terri, *Prinsip Prinsip Manajemen*, (Bumi Aksara, 2013), h. 3

menghindari permasalahan maka pihak perusahaan dan nasabah melakukan kesepakatan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sehingganya bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen perusahaan yaitu kinerja karyawan. Nasabah yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik akan menyebabkan keengganan nasabah untuk terus menjadi nasabah, dan cenderung beralih ke perusahaan lain. Karena hal itu pihak perusahaan haruslah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah, karena kinerja karyawan yang baik maka pihak perusahaan akan mendapatkan kepercayaan nasabah untuk terus datang ke perusahaan dan menjadi citra baik perusahaan, dan sebaliknya jika kinerja karyawan buruk tentu akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan.

*Middle Theory* atau teori pada level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. *Middle theory* pada penelitian ini adalah *controlling* (pengawasan) ialah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>2</sup> Dengan adanya pengawasan dapat membantu manajemen untuk mengetahui kinerja karyawan.

*Applied Theory* atau teori yang diaplikasikan. *Applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah). Di bawah ini adalah pemaparan mengenai *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>2</sup>Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133

### A. Gadai Syariah (*Rahn*)

*Rahn* dibolehkan dalam hukum Islam, kegiatan meminjam dan menahan barang sebagai jaminan untuk dikemudian hari yang memiliki utang akan mengembalikan pinjamannya kepada pemberi piutang. Jaminan disini juga bermanfaat untuk menjaga kepercayaan dan terdapat unsur keadilan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut.

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-hasbu* artinya penahanan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari.”<sup>3</sup>

Secara etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan uang yang bersifat mengikat.<sup>4</sup> *Ar-Rahn* menurut bahasa berarti ketepatan dan kekekalan. Makna syari'iyah juga diambilkan dari makna ini, karena keberadaan dan kekekalannya di tangan orang yang menerima gadai. Definisinya menurut syariat ialah menjadikan harta sebagai jaminan hutang sehingga hutang itu dilunasi, atau yang diambilkan dari nilai barang jaminan jika pembayaran hutang tidak terlunasi, yaitu yang diambilkan barang jaminan orang yang hutang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h. 283

<sup>4</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 128

<sup>5</sup>*Op.Cit.* h. 761

*Rahn* dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan pinjaman dana dengan perjanjian memberikan jaminan barang yang disesuaikan dengan aturan Islam. Jaminan tersebut sebagai upaya menjaga kepercayaan dan keadilan antara pihak yang menggadai dengan pihak penerima gadai. Jaminan diberikan dan dapat ditebus kembali apabila penggadai telah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

### 1. Dasar Hukum Gadai Syariah *Rahn*)

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep *muamalah* yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan. Adapun dalil yang menjadi alasan diperbolehkannya gadai yaitu dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Robbani* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 283

Ayat di atas memberikan gambaran yang umum, ketika tidak ada penulis dan saksi di tengah perjalanan bisa menggunakan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan. Berikutnya Hadis yang menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW pernah melakukan praktik gadai.<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ ذِرْعَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A’masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.” H.R Bukhori

Hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara muslim dan non muslim dalam bidang *muamalah*, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim.<sup>8</sup>

Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memberikan hutang. Namun kewajibannya untuk membantu diiringi pula dengan haknya untuk mendapatkan keyakinan bahwa barang atau uangnya kembali padanya. Untuk itu Islam mensyariatkan jaminan hutang, yang menjamin bahwa hutang akan dibayar. Jika tidak dibayar, maka jaminan tersebut dapat dijadikan penutup hutang yang bersangkutan.

<sup>7</sup> Bukhory, *Shahih Bukhory*, Terj: Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhory*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), Juz 3, h.538

<sup>8</sup>*Op.Cit*, h. 107.



## 2. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Kesepakatan tentang perjanjian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni utang piutang, karena tidak akan terjadi gadai dan tidak mungkin orang menggadaikan barang kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Maka ada rukun dan syarat gadai yang dimaksudkan untuk menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan.

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun,<sup>9</sup> antara lain:

- a) Akad ijab dan Kabul.
- b) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- c) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*).
- d) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Syarat-syarat *rahn* antara lain:<sup>10</sup>

- a) *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b) *Marhun*, bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. *Marhun bih*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

---

<sup>9</sup>*Op.Cit*,h. 107-108

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 392

c) Persyaratan *aqid*, Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria *al ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama Hanafiyah, *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu juga seorang wali tidak boleh menggadaikan barang-barang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

Rukun dan syarat gadai harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Uraian di atas telah menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan jika transaksi gadai ingin sesuai dengan gadai syariah.

### 3. Gadai Emas Syariah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada Lembaga Keuangan Syariah seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup>

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.

---

<sup>11</sup>Putri Dona Balqis, "Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," Jurnal Jurisprudence 7, No. 1 (2017):85

Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup> Gadai emas syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

*Rahn* emas syariah pada Bank Syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan *rahn* emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Praktik gadai emas, jaminan emas yang diberikan kemudian disimpan dalam penugasan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk membayar biaya sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai emas Bank Syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko yang mungkin akan terjadi.<sup>13</sup>

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal.402

<sup>13</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 402

<sup>14</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- a. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah.
- b. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
- c. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

#### 4. Hak dan Kewajiban Pihak Gadai Syariah

Pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai berikut:

##### a. Hak dan kewajiban *murtahin*

##### 1) Hak Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan pemberi gadai.

##### 2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

- b) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

1) Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- b) Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

2) Kewajiban Pemberi Gadai<sup>15</sup>

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang ditentukan *murtahin*.

---

<sup>15</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kaian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008). 45-46

- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahn* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

Ketentuan hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai dibuat tentunya memiliki tujuan, seperti menjaga *marhun* dari tindakan di luar kesepakatan, menjaga *rahn* dari tanggung jawab pelunasan hutang, menjaga *murtahin* dari haknya mendapatkan pelunasan hutang, menjaga *rahn* dan *murtahin* dari perjanjian yang tidak jelas, menerapkan sistem keadilan dengan adanya *marhun*, serta terhindar dari akad yang dilarang ajaran Islam.

## 5. Prosedur Gadai Syariah

Secara garis besar atau prosedur gadai dapat dijelaskan seperti berikut ini:

- a. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang Pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk di taksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.

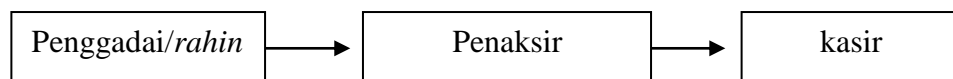
- c. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- d. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
- e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
- b. Pihak Pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
- c. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
- d. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.

- e. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurang pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.<sup>16</sup>

**Gambar 2.1**  
**Skema Prosedur Pemberian Kesepakatan**  
**Akad Ijarah Gadai Syariah<sup>17</sup>**



Skema tersebut dapat diterangkan:

- a. Penggadai (*rahin*) menuju loket penaksir dan menyerahkan barang gadai (*marhun*) untuk ditaksir nilainya.
- b. Penaksir bertugas menaksir barang gadai melalui uji kadar emas. Setelah barang gadai dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman barulah *rahin* mengisi blanko pengajuan gadai. Kemudian *Rahin* menerima penjelasan tentang akad gadai emas dan menandatangani Surat Bukti Gadai (Surat Bukti *Rahn*).
- c. *Rahin* ke loket kasir untuk menerima uang pinjaman.

## 6. Penyelesaian Gadai

Pelaksanaan gadai tidak diperbolehkan adanya syarat-syarat yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketika akad gadai diucapkan, “apabila *rahn* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang,” sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah

<sup>16</sup> *Op.Cit*, h. 269-270

<sup>17</sup> *Op. Cit*, h. 85.



ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya, ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya, daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>18</sup>

## **B. Shariah Compliance**

*Shariah compliance* adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>19</sup> Kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di Bank Syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan Bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.110

<sup>19</sup>*Op.Cit*, h. 2

Indonesia.<sup>20</sup> Makna Kepatuhan Syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>21</sup>

Beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar diatas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di Bank Syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional Bank Syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam Bank Syariah yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.<sup>22</sup> Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-

---

<sup>20</sup>Ansori, 'Pengungkapan *Shariah compliance* Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syhari'ah', *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3.2 (2013), 3.

<sup>21</sup>*Op.Cit*, h. 125

<sup>22</sup>*Ibid*, h.45

ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk Bank Syariah.

### 1. Dimensi *Shariah compliance*

Bank Syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip *Shariah* (*Shariah compliance*) apabila semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq, shadaqoh dengan amanah.<sup>23</sup> Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di Bank Syariah adalah seperti di bawah ini:

#### a. Tidak ada *riba* dalam transaksi bank

*Riba* menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*), dan membesar (*al-uluw*), dengan kata lain *riba* adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>24</sup>

#### b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Arti *gharar* adalah situasi diaman terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.3

<sup>24</sup>*Op.Cit.*, h.10

sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan.

*Gharar* terjadi apabila sesuatu yang sifatnya pasti menjadi tidak pasti.<sup>25</sup>

c. Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

*Maisir* adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain.<sup>26</sup>

d. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>27</sup> Bank Syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis keuntungan yang halal.

e. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

---

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 32

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 43

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 12

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad *wadiah* dan *ijarah*. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang teman yang disimpan oleh orang yang menemukannya. Bank Syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis yang dipercayakan kepadanya.

- f. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Salah satu diantara yang membedakan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat Bank Syariah pun wajib mengelola infaq dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada Bank Syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

## 2. Ketentuan *Shariah Compliance*

Jaminan kepatuhan syariah (*Shariah compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas Bank Syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kepatuhan syariah di dalam Lembaga Keuangan Syariah, antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan.
- b. Dana zakat dibayar dan dihitung dikelola dengan aturan prinsip syariah.

---

<sup>28</sup>*Op. Cit*, h. 146

- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Bank Syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut. Sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Bank Syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini.

### 3. Mekanisme *Shariah Compliance*

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di Bank Syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental.

- a. Konsep *Shariah review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah.
- b. Konsep internal *Shariah review* Bank Syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam Bank Syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam Bank Syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk Bank Syariah terhadap

---

<sup>29</sup>Ghaneiy Septian Ardahningsih, '*Shariah compliance Akad Murabahah Pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*', *Universitas Airlangga*, 2012, hal. 43-44.

kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional Bank Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Bank Syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada Bank Syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqih Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke Bank Syariah.

#### **4. Pengawasan *Shariah Compliance***

Sebagai upaya pengendalian, meskipun sesuatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Dalam menjalankan usahanya bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut terpelihara dalam operasionalnya.

##### **a. Melalui Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Bank Syariah, ada lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap operasional Bank Syariah, yakni Dewan Pengawas Syariah. Lembaga ini biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam rapat pemegang

saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah bertugas meneliti produk-produk baru Bank Syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat pertanyaan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain Dewan Pengawas Syariah, pada tingkat nasional ada pula Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan pada tahun 1997, yang merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, yang ketua dan sekretaris umumnya secara *ec officio* dijabat oleh ketua dan sekretaris Majelis Ulama Indonesia. Tugas lembaga ini antara lain, adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain.
- 2) Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang akan dikembangkan pada Bank Syariah yang diajukan oleh manajemen bank yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah.
- 4) Merekomendasikan ulama yang akan ditugaskan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah.

Tujuan utama dibentuknya Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Surat keputusan Majelis

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 125



Ulama Indonesia (MUI) No. Kep/98/MUI/2001 bahwa mekanisme kerja DPS antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS di bawah pengawasannya.
- 2) Berkewajiban mengusulkan pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan DSN.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam tiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Pedoman tersebut dalam bentuk fatwa fatwa yang wajib menjadi kerangka kerja pada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap produk gadai di Lembaga Keuangan Syariah ialah fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*,

---

213 <sup>31</sup>Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 2018), h.

<sup>32</sup>*Ibid*

dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketentuan      Fatwa      Dewan      Syariah      Nasional      Nomor

26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasi hanya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>34</sup>

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 12

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki keuangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>35</sup> Ketentuan-ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi acuan dasar Bank Syariah dalam menjalankan produk-produknya. Dengan demikian, Bank Syariah dapat dikenakan sanksi administratif jika produk yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal ini Fatwa SDN-MUI). Sanksi administratif tersebut berupa: (1) peringatan, (2) pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*).<sup>36</sup>

Dewan Syariah Nasional memberikan sanksi berupa teguran kepada industri keuangan syariah jika industri yang bersangkutan menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada Industri keuangan syariah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencideraan terhadap kerangka regulasi yang ada, dimana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud dapat berupa berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan. Kemudian apabila pihak industri keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka pihak DSN dapat

---

<sup>35</sup>Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, 17

<sup>36</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1), 32

mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti OJK, serta instansi terkait lainnya, untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha/lisensi agar industri keuangan syariah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah.<sup>37</sup>

#### **b. Melalui Usaha yang Dibiayai**

Upaya lainnya dari Bank Syariah untuk menjaga agar usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah adalah melalui usaha yang dibiayainya. Sebelum menyetujui usul pembiayaannya, lebih dulu diseleksi hal-hal yang berhubungan dengan usaha pembiayaan tersebut. Ini dilakukan agar jangan sampai usaha yang dibiayai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal-hal yang diperhatikan sebelum menyetujui usul pembiayaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Apakah pembiayaan halal atau haram.
- 2) Apakah objek pembiayaan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
- 3) Apakah berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila.
- 4) Apakah objek berkaitan dengan perjudian.
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau beorientasi pada pembangunan senjata pemusnahan masal.
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>37</sup>Luqman Nurhisam, "Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah," 92

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 125

## C. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

### 1. Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah)

Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan permes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Undang-undang tentang perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Perbankan) menyebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai aturan perbankan tertinggi dalam hierarki perundangan yang berlaku di Indonesia, secara prinsip seluruh ketentuan yang mengatur tentang industri perbankan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perbankan ini.

Fungsi dan peranan bank secara umum ada 3 hal, yaitu: <sup>39</sup>

#### a. Penghimpun dana

Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya antara lain bersumber dari:

- 1) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian atau pun pengembangan modal.
- 2) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro.
- 3) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjam).

#### b. Penyalur dana

Penyalur atas dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank diwujudkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat

---

<sup>39</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 3-4

yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan lain sebagainya. Aktivitas ini menimbulkan resiko, karena itu dalam memenuhi asas kehati-hatian, pelaksanaannya ditetapkan berbagai persyaratan ketentuan.

c. Penyalur jasa keuangan

Sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer/penagihan surat berharga/*collection*, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (debit/kredit), BI-RTGS, SKN-BI, ATM, E-banking sampai dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah, menurut Pasal 1 ayat 13 dari UU tentang Perbankan, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan beragam produk

dan layanan jasa perbankan serta skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Perkembangan industri perbankan syariah nasional juga telah menjadi landasan hukum yang memadai melalui penerbitan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan penerbitan UU ini, diharapkan pertumbuhan industri perbankan syariah menjadi lebih cepat dan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, dan objek haram. Ketentuan pokok hukum Islam tersebut didefinisikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. *Adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- b. *Tawazun* adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. *Maslahah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif dan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. *Alamiyah* adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama,

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 117

- ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
- e. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
  - f. *Maysir* adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas sektor ril.
  - g. *Riba* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).
  - h. *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
  - i. *Risywah* adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam satu transaksi.
  - j. Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

## 2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah)

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah.<sup>41</sup>

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 178

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 286



umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bunga.

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:<sup>43</sup>

- a. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran mulai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian: penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dan pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

Operasi Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018). 286

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui *akad* gadai, *akad* ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- c. Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan hutang.
- d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut *akad*; pelunasan penuh, uang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.<sup>45</sup>

#### **D. Pendekatan *Maslahah* dan *Maqasid* Syariah**

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid* Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar. Adapun ruh dari konsep *maqasid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid* syariah tersebut adalah maslahat.

*Maqasid* syariah menjadi dasar hukum yang tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum utama dalam Islam. Secara garis besar para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqasid* syariah yaitu bahwa *maqasid* syariah harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).<sup>46</sup> Dalam setiap tingkatan mempunyai kalsifikasi tersendiri yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>*Op.Cit*, h. 17

<sup>45</sup>*Op.Cit*, h. 17

<sup>46</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushuk Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h.548

1. Pokok/primer (*al-daruriyyah*)

*Al-Daruriyyah* merupakan pencapaian *masalah* paling dasar yang harus dicapai sebelum mencapai tahapan kedua. *Al Daruriyyah* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al umur al khamseh*), baik dengan menegakan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al mafasid*), yang atau akan terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

2. Kebutuhan/sekunder (*al-hajiyyah*)

Tahapan kedua adalah *al-Hajiyyah* merupakan tahapan yang dicapai setelah mencapai tahapan pertama (*al-daruriyyah*). Adalah kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok tersebut.

3. Pelengkap/tersier (*al-tahsiniyyah*)

Tahapan ketiga adalah *al-tahsiniyyah* merupakan tahapan paling puncak, tahapan yang dicapai setelah sempurnanya tahapan *al-daruriyyah* dan tahapan *al-hajiyyah*. Diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.

## E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang berkaitan.

Sebagaimana deskripsi dalam latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan implementasi gadai emas pada di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *Shariah compliance*. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Penelitian Muhammad Iqbal Ibrahim dan Lucky Rahmawati, dengan judul penelitian persepsi nasabah tentang implementasi *shariah compliance* dan *good*

---

<sup>47</sup>Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hh.126-127

*corporate governance* terhadap loyalitas nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa secara simultan kedua variabel ini saling berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, nasabah yang cerdas akan memilih perbankan yang sudah mengimplementasikan *shariah compliance* dan *good corporate governance* dengan baik dan benar.<sup>48</sup>

Penelitian Luqman Nurhisam, dengan judul kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam industri keuangan syariah menjelaskan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menentukan terlaksananya *Shariah compliance* di Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syariah.<sup>49</sup>

Penelitian oleh Bagya dan Jasril, dengan judul penelitian peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah dapat merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan diantaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad Iqbal Ibrahim dan Lucki Rahmawati, *Persepsi Nasabah Tentang Implementasi Syariah Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Surabaya, Volume 3 Nomor, (2020), h.53

<sup>49</sup>Luqman Nurhisam, 'Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah', *Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies*, 3.1 (2016), 23.

<sup>50</sup>Bagya Agung Prbowo and Jasril bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Faculty of Law Universitas Kebangsaan Malaysia Dan*

Penelitian selanjutnya oleh Ade Sofyan Mulazid, dengan judul Pelaksanaan *Shariah compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah Jakarta), hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran direktur kepatuhan dan satuan satuan kerja kepatuhan memiliki posisi strategis dalam mengawasi *shariah compliance*.<sup>51</sup>

Penelitian oleh Ike Fujianty, Amrullah Hayatudin, Panji Adam, dengan judul penelitian Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/II/2002 Tentang Penentuan Biaya *Ijarah* dalam Sistem Gadai Emas. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa perhitungan biaya *ijarah* Pegadaian Syariah belum mengimplentasikan Fatwa No 26/DSN-MUI/II/2002 karena biaya *ijarah* masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>52</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan sama-sama menjadikan *shariah compliance* sebagai variabel penelitian. Pada penelitian ini juga menggunakan *shariah compliance* variabel penelitian, hanya saja pada penelitian ini *shariah compliance* digunakan sebagai peninjau implementasi gadai emas syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah Mandiri) dan Lembaga Keuangan Syariah non Bank (Pegadaian Syariah).

---

Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Journal hukum IUS QUIA IUSTUM, 2017), VOL. 1, No. 4.h. 113

<sup>51</sup>Abu Sofyan Mulazid, 'Pelaksanaan *Shariah compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)', *Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah*, 20.1 (2016), 37.

<sup>52</sup>Ike Fujianty, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam, 'Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.2/ DSN-MUI/II/2002 Tentang Penentuan Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung*, 5 (2019). h. 23

## DAFTARPUSTAKA

- Ansori. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syhari'ah." *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 2013
- Antonio, Muhammad Syafei. *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999
- Ardahningsih, Ghaneiy Septian. "Syariah Compliance Akad Murabahah Pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng." Universitas Airlangga. 2012
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher. 2009
- Azwar, Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Balqis, Putri Dona. "Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," *Jurnal Jurisprudence*. 2017
- Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, 17
- Bukhory, *Shahih Bukhory*, Terj: Ahmad Sunarto dkk. *Shahih Bukhory*. Semarang: Asy-Syifa, 1992
- Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya Robbani*. Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Eng Saiful Anwar dan Muhammad Luthfi, Ismail A. Said. *Penghantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Fujianty, Ike., Amrullah Hayatudin, and Panji Adam. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.2/ DSN-MUI/II/2002 Tentang Penentuan Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung." *Prosiding*

- Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung. 2019 Gulo,W.,  
*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT GrafindoPersada. 2005
- Ibrahim, Muhammad Iqbal dan Lucki Rahmawati, “Persepsi Nasabah Tentang Implementasi Syariah Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Universitas Negeri Surabaya. 2020
- Ikatan Bankir Indonesia. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Ismail, Nawawi. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2009
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008  
Kodifikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1), 32
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Lewis, Mervyn K, and Lativa M. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007
- M. Chapra dan H. Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Maradita, “Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.” *Yuridika* Volume 29 Nomor 2, 2012
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media. 2018
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2004
- Mulazid, Abu Sofyan. “Pelaksanaan Syariah compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta.” Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah. 2016

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Nugroho, Lucky dkk. "Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri – Tomang Raya)." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2020
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah." *Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies*. 2016
- Prbowo, Bagya Agung, and Jasril bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Faculty of Law Universitas Kebangsaan Malaysia Dan Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Yogyakarta." *Journal hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2017
- Purnamasari, Safitri Intan dan Yayat Rahmad Hidayat. "Tinjauan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung. 2020
- Puspitasari, Novi. *Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press, 2018
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2010
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES. 2007
- Subagyo, Joko Subagyo. *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*



Yogyakarta: EKONISIA. 2008

Sudrajad, M.Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. 2016

Suharto, Dkk. *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. 2011

Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2002

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Susilo, Edi. "Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah." Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara. 2017

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2019

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Terri, George R. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009

Wardayati, Siti Maria. "Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah." 2011

Wirawan. *Budaya dan Iklim Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Yafiz, Muammad dan Darwis Harahap. Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi. *Jurnal Human Falah*. Volume 5 No.1, 2018

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006  
Yulianti, Rahmani Timorita. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah." *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*. 2009

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Penerjemah: Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

LAMPIRAN

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**Tabel Pedoman Wawancara**  
**Pegadaian Syariah Cabang Metro**

No	Indikator <i>Shariah Compliance</i>	Pedoman Wawancara
1	<p>Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan. Berdasarkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i></li> <li>2. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>2. Apakah akad/kontrak yang digunakan dalam produk gadai emas?</li> <li>3. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>4. Apakah syarat yang diperlukan dalam proses pengajuan gadai emas?</li> <li>5. Bagaimana metode perhitungan biaya administrasi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>6. Bagaimana metode perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>7. Kenapa perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai masih menjadikan jumlah pinjaman sebagai prentase perhitungan?</li> <li>8. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Metro memberikan rincian penggunaan biaya administrasi?</li> <li>9. Bagaimana prosedur penjualan marhun apabila telah jatuh tempo?</li> </ol>
2	<p>Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat (memberikan kenyamanan).</li> <li>2. Peralatan (memiliki alat, fasilitas lengkap yang menunjang pekerjaan).</li> <li>3. Proses kerja (urutan pelaksanaan kerja yang alami dan teratur).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah karyawan mendapatkan sarana prasarana dan alat yang lengkap?</li> <li>2. Apakah karyawan mendapatkan kenyamanan dan proses kerja yang teratur?</li> <li>3. Bagaimanakah proses kerja dan aturan kerja di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>4. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Metro memberikan pelayanan yang memuaskan?</li> <li>5. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Metro memiliki ruangan yang nyaman</li> </ol>

		<p>dan bersih?</p> <p>6. Apa yang menjadi kekurangan pelayanan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</p>
3	<p>Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tauhid</li> <li>2. Keadilan</li> <li>3. Keseimbangan</li> <li>4. Tidak melakukan monopoli</li> <li>5. Amanah</li> <li>6. Jujur</li> <li>7. Menjual produk halal</li> <li>8. Tidak melakukan praktik mal bisnis (<i>gharar</i>, menipu, <i>riba</i>, ihtikar, mengurangi timbangan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi pedoman produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>2. Bagaimana Pegadaian Syariah Cabang Metro mengetahui kalau bisnis atau usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah?</li> <li>3. Apakah ada wawancara dan survei yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Metro kepada nasabah atas penggunaan pinjaman?</li> <li>4. Apakah usaha atau bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah?</li> </ol>
4	<p>Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Metro memiliki Dewan Pengawas Syariah?</li> <li>2. Bagaimana proses Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> <li>3. Apakah sanksi yang diberikan terhadap Pegadaian Syariah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku?</li> <li>4. Apakah Dewan Pengawas Syariah mengetahui metode perhitungan penetapan biaya administrasi?</li> <li>5. Apakah Dewan Pengawas Syariah mengetahui metode perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> </ol>
5	<p>Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darimana sumber dana Pegadaian Syariah Cabang Metro?</li> </ol>

**Tabel Pedoman Wawancara**  
**Bank Syariah Mandiri KC Metroo**

No	Indikator <i>Shariah Compliance</i>	Pedoman Wawancara
1	<p>Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan.</p> <p>Berdasarkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i>.</li> <li>2. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metroo?</li> <li>2. Apakah akad/kontrak yang digunakan dalam produk gadai emas?</li> <li>3. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro?</li> <li>4. Apakah syarat yang diperlukan dalam proses pengajuan gadai emas?</li> <li>5. Bagaimana metode perhitungan biaya administrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro?</li> <li>6. Bagaimana metode perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro?</li> <li>7. Kenapa perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai masih menjadikan jumlah pinjaman sebagai prentase perhitungan?</li> <li>8. Apakah Bank Syariah Mandiri KC Metro memberikan rincian penggunaan biaya administrasi?</li> <li>9. Bagaimana prosedur penjualan marhun apabila telah jatuh tempo?</li> </ol>
2	<p>Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat (memberikan kenyamanan).</li> <li>2. Peralatan (memiliki alat, fasilitas lengkap yang menunjang pekerjaan).</li> <li>3. Proses kerja (urutan pelaksanaan kerja yang alami dan teratur).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah karyawan mendapatkan sarana prasarana dan alat yang lengkap?</li> <li>2. Apakah karyawan mendapatkan kenyamanan dan proses kerja yang teratur?</li> <li>3. Bagaimanakah proses kerja dan aturan kerja di Bank Syariah Mandiri KC Metro?</li> <li>4. Apakah Bank Syariah Mandiri KC Metro memiliki pelayanan yang baik?</li> <li>5. Apakah Bank Syariah Mandiri KC Metro memiliki ruangan yang nyaman dan bersih?</li> <li>6. Apa yang menjadi kekurangan pelayanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro?</li> </ol>
3	<p>Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi pedoman produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro?</li> </ol>

	syariah. 1. Tauhid 2. Keadilan 3. Keseimbangan 4. Tidak melakukan monopoli 5. Amanah 6. Jujur 7. Menjual produk halal 8. Tidak melakukan praktik mal bisnis ( <i>gharar</i> , menipu, <i>riba</i> , ihtikar, mengurangi timbangan)	2. Bagaimana Bank Syariah Mandiri KC Metro mengetahui kalau bisnis atau usahayang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah? 3. Apakah ada wawancara dan survei yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Metro kepada nasabah atas penggunaan pinjaman? 4. Apakah usaha atau bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah?
4	Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.	1. Apakah Bank Syariah Mandiri KC Metro memiliki Dewan Pengawas Syariah? 2. Bagaimana proses Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro? 3. Apakah sanksi yang diberikan terhadap Pegadaian Syariah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku? 4. Apakah Dewan Pengawas Syariah mengetahui metode perhitungan penetapan biaya administrasi? 5. Apakah Dewan Pengawas Syariah mengetahui metode perhitungan biayapemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Metro?
5	Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.	1. Darimana sumber dana Bank Syariah Mandiri KC Metro?

## Lampiran 2 Gambaran Umum Perusahaan

### 1. Profil Pegadaian Syariah

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam merupakan peluang pasar baru bagi Pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional. Sehingga pada tahun 2003 PERUM Pegadaian membuka Unit Layanan Gadaai Syariah yang tersebar di Indonesia termasuk Lampung. Dengan mottonya “*Mengatasi Masalah Sesuai Syariah*” Pegadaian Syariah memiliki misi menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga.

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Lampung berlokasi di Bandar Lampung. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada 1 Desember tahun 2009 kantor wilayah Pegadaian membuka Pegadaian Syariah yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kel. Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Lampung. Pegadaian Syariah ini adalah Cabang dari Pegadaian Syariah Radin Intan, Bandar Lampung dan satu-satunya Pegadaian Syariah yang ada di Kota Metro.

### 2. Syarat Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Metro

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan gadaai emas syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dll).
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*), yaitu emas
- 4) Membawa surat emas (jika ada).

### 3. Data perkembangan OSL dan Rahn Pegadaian Syariah Metro

Tanggal	Produk	OSL	Jumlah Rekening	Rahn Aktif
31/12/2015	<i>Rahn</i>	3.354.590.000	893	617
31/12/2016	<i>Rahn</i>	4.562.750.000	923	633
31/12/2017	<i>Rahn</i>	5.183.146.418	1.024	973
31/12/2018	<i>Rahn</i>	5.340.285.305	1.206	1.033
31/08/2019	<i>Rahn</i>	5.507.887.735	1.901	1.633

#### 4. Golongan Jaminan Pada Pegadaian Syariah

No	Golongan	Jumlah Pinjaman/Pembiayaan
1	A	Rp.50.000 – Rp.500.000
2	B	Rp.510.000 – Rp.5.000.000
3	C	Rp.5.050.000 – Rp.20.000.000
4	D	Rp.20.050.000 – Rp.1.000.000.000

#### 5. Karakteristik Gadai Emas Pegadaian Syariah

Jenis Produk	Gadai emas ( <i>Rahn</i> emas) Pegadaian Syariah
Peruntukan	Umum, konsumtif/produktif
Objek Gadai	Emas dalam Perhiasan bentuk logam mulia atau
Perikatan	<i>Rahn</i> dan <i>ijarah</i>
Jangka waktu	Maksimal 4 bulan atau 120 hari
Syarat gadai ulang	Membayar biaya administrasi dan biaya sewa sebelumnya.
Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp. 50.000 s/d Rp. 250.000.000
Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran	Maksimal 95% dari standar taksiran logam.
Biaya pemeliharaan	Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan bergantung pada taksiran emas yang digadaikan
Harga dasar emas	Ditentukan dari pusat sesuai dengan STL (standar Taksiran Logam)



## 1. Profil Bank Mandiri Syariah

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat dan Bank-Bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merakapitalisasi sebagian Bank-Bank Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No.10 tahun 1998, yang member peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual bankingsystem*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri KC Metro secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 atau tanggal 1 November 1992.

Bank Syariah Mandiri KC Metro merupakan Kantor Cabang (KC) dari PT Bank Syariah Mandiri KC Metro yang terletak di Kota Metro Lampung. Didirikan dengan tujuan perluasan jaringan kantor. Bank Syariah Mandiri KC Metro terdiri atas Bank Syariah Mandiri KC Metro Kantor Pusat, Bank Syariah Mandiri KC Metro Kantor Wilayah, Bank Syariah Mandiri KC Metro Kantor Area, Bank Syariah Mandiri KC Metro Kantor Cabang, Bank Syariah Mandiri KC Metro Kantor Cabang Pembantu dan Bank Syariah Mandiri KC Metro Kantor Kas. Kantor Cabang Bank Syariah

KC Metro berawal dari kantor Cabang pembantu pada tahun 2005. Pada bulan November 2011 Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu naik menjadi kantor Cabang. Beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 43E-F, Kel. Imopura, Kota Metro, Lampung.

Visi Bank Syariah Mandiri KC Metro ialah mewujudkan Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada *segmen micro*, *SME*, *commercial* dan *corporate* serta dapat mewujudkan Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi dari Bank Syariah Mandiri KC Metro ialah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah *universal*.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## 2. Syarat dan Ketentuan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KC Metro

Untuk melakukan gadai emas ini, maka syarat yang diperlukan tentunya adalah:

- a. Kartu identitas nasabah (KTP), tidak harus domisili Metro.
- b. Buka rekening BSM .
- c. NPWP, kalau tidak ada NPWP bisa membuat surat pernyataan tidak memiliki NPWP.
- d. KTP pasangan (kalau sudah menikah).
- e. Saldo minimal rekening Rp. 50.000,-
- f. Surat emas (jika ada)

## 3. Produk gadai emas (*Rahn* emas) di Bank Syariah Mandiri KC Metro.

Jenis Produk	Gadai emas ( <i>Rahn</i> emas)
Peruntukan	Perorangan, konsumtif/produktif
Objek Gadai	Emas dalam bentuk perhiasan dan emas Lantakan
Perikatan	<i>Qardh</i> dan <i>Rahn</i>
Jangka waktu	Maksimal 4 bulan atau 120 hari
Syarat gadai ulang	Setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai.
Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp.250.000.000
Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran	Maksimal 80% s/d 95% dari standar taksiran logam.

**4. Biaya Administrasi Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KC Metro**

No	Nilai Taksiran Jaminan	Biaya Administrasi (Rp)
1	Rp.500.000 – Rp.5.000.000	Rp.18.000
2	Rp.5.000.000 – Rp.10.000.000	Rp.25.000
3	Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000	Rp.35.000
4	Rp.20.000.000 – Rp.50.000.000	Rp.60.000
5	Rp.50.000.000-Rp.100.000.000	Rp.100.000
6	Rp.100.000.000 – Rp.250.000.000	Rp.125.000

**5. Perhitungan *Equivalent Rate* Gadai Emas Syariah**

Besaran Biaya Pemeliharaan ( <i>Equivalent Rate</i> )		
Golongan Jaminan	Nominal Pembiayaan Gadai	Biaya Pemeliharaan/ Bulan
Perhiasan	Rp.500.000 – Rp. 20.000.000	1,70%
	Rp.20.000.000 – Rp.50.000.000	1,53%
	Rp.50.000.000 – Rp.100.000.000	1,49%
	Rp.100.000.000 – Rp.250.000.000	1,45%
Lantakan	R.500.000 – Rp.250.000.000	1,35%

**6. Data Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KC Metro**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	101
2	2016	151
3	2017	144
4	2018	145
5	2019	162

### Lampiran 3 Dokumentasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro

#### 1. Brosur Gadai Emas

Pegadaian

**rahn**

**BUMN**  
*Hadir untuk negeri*

**RAHN** adalah pinjaman dengan sistem gadai syariah sesuai Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dengan jaminan emas, elektronik dan kendaraan bermotor

Golongan	Marhun Bih	Tarif Mu'nah
<b>HASAN</b>	<b>50.000 - 500.000</b>	<b>0 %</b>
<b>B</b>	<b>510.000 - 5.000.000</b>	<b>0.71%</b>
<b>C</b>	<b>5.050.000 - 20.000.000</b>	<b>0.71%</b>
<b>D</b>	<b>&gt; 20.000.000</b>	<b>0.62%</b>

**Rahn Fleksi** - Rahn dengan mu'nah harian  
 $0,10\% \times \text{nilai nilai taksiran (minimal 0,5\%)}$

**Rahn Bisnis** - Untuk UP > 100.000.000  
 $(0,38 - 0,55\%) \times \text{nilai taksiran marhun}$

**15 MENIT CAIR**

Nasabah datang dengan membawa (marhun) agunan

Marhun ditaksir oleh Penaksir

Marhun Bih diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer

[illegible]

No. SBR :	GOL. ....
<b>Uraian Barang Jaminan / Marhun dan Hasil Pengujian</b>	
	<b>Penaksir 1</b>
	Taks. Rp .....
	MB Rp .....
	<b>Penaksir 2</b>
	Taks. Rp .....
	MB Rp .....
	<b>Penaksir 3</b>
	Taks. Rp .....
	MB Rp .....
	<b>KPT</b>
Taks. Rp .....	
MB Rp .....	

**Penaksir 1**

( ..... )

Tanggal         -      -

Validasi Taksiran Oleh :		KPT
Penaksir 2	Penaksir 3	
( ..... )	( ..... )	( ..... )



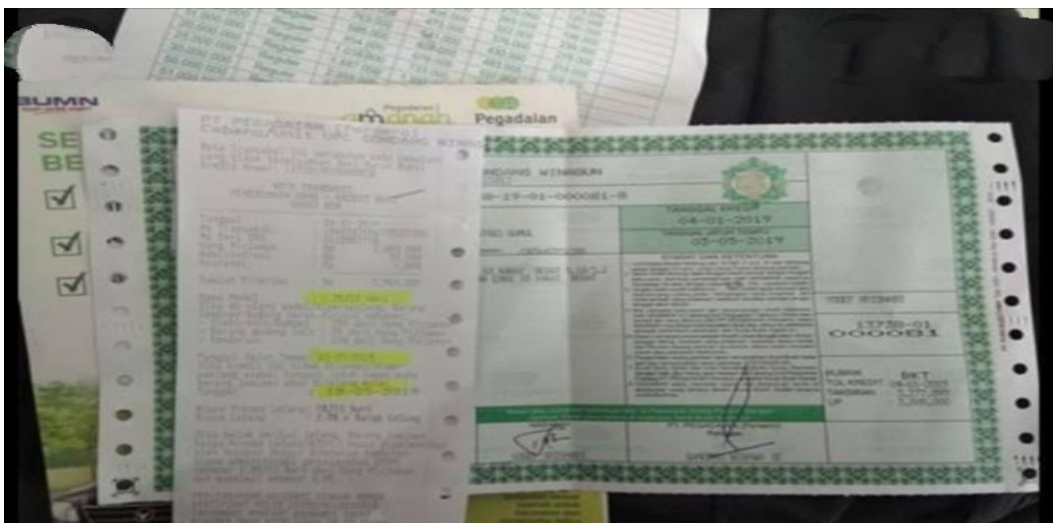
4. Proses penaksiran barang gadai menggunakan uji karatase



5. Pengemasan barang gadai sebelum dimasukkan ke dalam brankas



6. Surat bukti gadai



1. Brosur gadai emas

[illegible]



3. Karyawan menaksir nilai barang gada



4. *Pawning officer* gadai emas



5. Ruangan Bank Syariah Mandiri

